

Frequently Asked Questions (FAQ)

SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Tata Kelola BPRS)

1. Apakah *self assessment* penerapan tata kelola menjadi bagian dari penilaian tingkat kesehatan BPRS?

Self assessment saat ini bukan merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan BPRS namun penilaian tingkat kesehatan BPRS direncanakan akan mengarah pada metode *risk-based bank rating* yang antara lain terdiri dari penilaian penerapan tata kelola dan profil risiko BPRS.

2. Apakah paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam laporan penerapan tata kelola BPRS diungkapkan secara individu atau secara akumulatif?

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan secara akumulatif untuk masing-masing kelompok jabatan (Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS).

3. Bagaimana ruang lingkup permasalahan hukum yang diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS??

Ruang lingkup permasalahan hukum yang diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS adalah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang diselesaikan melalui jalur hukum/peradilan, baik yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih dalam proses penyelesaian termasuk apabila sidang belum dilaksanakan.

Termasuk dalam permasalahan hukum yang diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui litigasi.

4. Dalam hal PSP BPRS berbentuk badan hukum, bagaimana mengidentifikasi hubungan keluarga Komisaris Independen/Pihak Independen dengan PSP?

Hubungan keluarga antara Komisaris Independen/Pihak Independen dengan PSP BPRS dilihat dari hubungan keluarga dengan individu dari badan hukum PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*.

Contoh ilustrasi:

- a. Nyonya M merupakan calon Komisaris Independen BPRS XYZ.
- b. BPRS XYZ memiliki PSP yaitu PT. ABC
- c. PT. ABC memiliki PSP yaitu PT. DEF
- d. PT. DEF memiliki PSP yaitu Tuan G sekaligus pengendali terakhir kelompok usaha.

Dengan demikian, Nyonya M memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPRS XYZ apabila Nyonya M tidak memiliki hubungan keluarga/semenda sampai dengan derajat kedua dengan Tuan G selaku *ultimate shareholder* BPRS X.

5. Apa contoh kegiatan BPRS yang tidak termasuk produk dan aktivitas BPRS yang dinilai sebagai salah satu objek tugas dan tanggung jawab DPS BPRS?

DPS dapat mengawasi kegiatan BPRS selain produk dan aktivitas antara lain mengenai penyaluran dana kebajikan BPRS.

- 6. Siapakah pihak yang berwenang untuk menandatangani surat pernyataan independen calon Komisaris Independen apabila direktur utama berhalangan sementara atau terdapat kekosongan jabatan direktur utama dan komisaris utama?**

Jika direktur utama berhalangan sementara maka pihak yang berwenang menandatangani surat pernyataan independen calon Komisaris Independen yaitu Direksi.

- 7. Terdapat beberapa persamaan materi antara laporan penerapan tata kelola dengan laporan keuangan tahunan. Dengan demikian, apakah laporan penerapan tata kelola dapat digabung dengan laporan keuangan tahunan?**

Tidak. Ruang lingkup laporan penerapan tata kelola berfokus pada penilaian terhadap penerapan tata kelola BPRS, termasuk antara lain pengungkapan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris dan DPS, serta transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sedangkan ruang lingkup laporan keuangan tahunan berfokus pada kinerja keuangan BPRS secara tahunan.

- 8. Apakah pegawai yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS harus independen terhadap fungsi lain di BPRS?**

Tidak. Pegawai yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dapat merangkap jabatan pada fungsi lain kecuali fungsi audit intern.

- 9. Apakah yang dimaksud dengan faktor penilaian mendapatkan nilai Tidak Baik (5) yang mengakibatkan Peringkat Komposit Tata Kelola yang dapat dicapai BPRS paling tinggi Cukup Baik meskipun hasil akhir penilaian sendiri Peringkat Komposit Tata Kelola mencapai Baik atau Sangat Baik?**

Apabila seluruh kriteria atau indikator atas faktor penilaian tersebut mendapatkan nilai Tidak Baik (5) pada Skala Penerapan.